



Perempuan dan Perubahan di Perdesaan: Studi Kasus Lurah Sriharjo, Kabupaten Bantul

Nefa Wahyuning Anggraini¹, Andre Dwi Prasaja²

Abstract

Village governments is a vital autonomous institutions based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Sriharjo village is one example of local democracy with its first female village head. During the leadership of the Sriharjo village head, there were obstacles and challenges, particularly in the political dynamics of Sriharjo village. The aim of this research is to analyze women's leadership in the implementation of village government policies in line with the political dynamics in Kalurahan Sriharjo. The theoretical foundation of this research uses Bass and Avolio's transformational leadership. This study uses a qualitative intrinsic case study method based on Robert K. Yin. Data was obtained through observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the leadership of the Sriharjo village head has brought significant changes in terms of policies and social and political institutions. Essentially, the village head is not solely focused on power to manage the government; the most important aspect is the elaboration for sustainable development. Efforts to improve Sriharjo require a long process and the involvement of various parties, including supra-village levels.

Keywords

Leadership; Women; Local Politics; Sriharjo

Abstrak

Pemerintahan desa menjadi kelembagaan vital yang otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu praktik demokrasi lokal dengan kepemimpinan lurah perempuan pertama. Selama masa kepemimpinan lurah Sriharjo, terdapat hambatan dan tantangan khususnya pada dinamika politik di Kalurahan Sriharjo. Tujuan penelitian ini menganalisis kepemimpinan perempuan dalam implementasi kebijakan pemerintahan desa yang beriringan dengan dinamika politik di Kalurahan Sriharjo. Landasan teoretis penelitian ini menggunakan transformational leadership Bass dan Avolio. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus intrinsik dari Robert K. Yin. Data diperoleh dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah Sriharjo telah membawa perubahan signifikan dalam hal kebijakan dan kelembagaan sosial dan politik. Prinsipnya, lurah tidak hanya fokus dalam kekuasaan untuk mengel-

¹ Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Nefa Wahyuning Anggraini, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia ✉ nefawahyuninganggraini@gmail.com



ola pemerintahan, hal terpenting dari elaborasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Upaya membawa Sriharjo menjadi lebih baik membutuhkan proses panjang dan keterlibatan banyak pihak seperti supra desa.

Kata Kunci

Kepemimpinan; Perempuan; Politik Lokal; Sriharjo

Article history

Received 7 October 2024

Revised 28 November 2024

Accepted 30 November 2024

Published 4 December 2024

Cite this article

Anggraini, N.W., & Prasaja, A.D. (2024). Perempuan dan Perubahan di Perdesaan: Studi Kasus Lurah Sriharjo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Politik Profetik*, 12(2), 116-132.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v12i2a2>

Pendahuluan

Isu perempuan dalam panggung politik masih menjadi perdebatan intens di berbagai forum akademik. Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana perempuan mampu memimpin organisasi atau institusi dengan beragam kompleksitasnya. *Stereotype* kuat yang melekat pada perempuan ialah lebih mengutamakan perasaan dan emosional saat memegang posisi kepemimpinan (Muktamar, 2022; Budiarta, 2022). Kepemimpinan perempuan kini menjadi bagian dari gerakan kesetaraan gender dalam melawan sistem patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Ketidaksetaraan struktural ekstrinsik yang menghambat akses perempuan ke posisi kepemimpinan meliputi bias gender dan ras (Suciu et al., 2023). Hambatan ini penting untuk memahami tantangan yang dihadapi perempuan dalam peran kepemimpinan. Karakteristik intrinsik yang mendukung keberhasilan pemimpin perempuan antara lain kesadaran, rasa hormat, kepercayaan diri, penerimaan, dan ketahanan. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci bagi perempuan dalam memperoleh dan mempertahankan posisi kepemimpinan.

Meskipun dominasi laki-laki dalam kepemimpinan tetap kuat, Nasution et al. (2024) mencatat adanya perubahan signifikan, terutama berkat advokasi hak asasi dan kesetaraan gender oleh para aktivis feminis. Perjuangan kesetaraan gender melalui partisipasi politik perempuan didorong oleh upaya meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah publik. Partisipasi politik perempuan merupakan langkah penting dalam memperjuangkan hak atas pendidikan dan perlindungan kelompok rentan. Tren politik modern menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia sejumlah tokoh politik perempuan yang menonjol, seperti Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Najwa Shihab, dan perempuan lainnya. Kepemimpinan perempuan juga semakin meluas hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa.

Pemimpin diibaratkan seperti perahu yang mampu membawa, mendorong, dan memanfaatkan sumber daya untuk menggerakkan anggotanya menuju visi misinya (Rumimpunu, 2018). Seorang pemimpin harus mampu merespons perubahan yang terjadi secara adaptif, transformatif terhadap struktur, fungsi, pendanaan, dan metode yang dapat mengantarkan organisasi dalam meraih misinya (Trautmann, 2007). Pemimpin memiliki perbedaan secara peran, yaitu perempuan dan laki-laki. Dalam kasus budaya organisasi yang didominasi laki-laki, para pemimpin mempertahankan budaya agresif, kompetitif, dan melemahkan bagi mereka yang berada di peringkat bawah, gaya yang diasosiasikan dengan prototipe pemimpin laki-laki (Watkins & Smith, 2014). Perempuan dikenal karena menerapkan kepemimpinan yang lebih komunal, akomodatif, dan lemah lembut dengan fokus pada teman sejawat yang sering dianggap kurang bernilai bagi kepemimpinan. Perkembangan teori kepemimpinan semakin pesat dan signifikan. Teori kepemimpinan kontemporer telah bergeser dan memberikan penekanan pada karakter maupun perilaku dari seorang pemimpin. Perempuan cenderung lebih sering mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional, yang fokus pada memberdayakan anggota tim.

Dalam kepemimpinan transformasional Bass dan Avolio (1990), terdapat 4 dimensi yaitu, 1) Idealized Influence, didasarkan atas keteladanan, kejujuran, wibawa, semangat, adanya pujian, dan berekspresi; 2) Intellectual Stimulation, yaitu pemimpin yang menstimulasikan para anggota untuk kreatif dan inovatif, dengan indikator mencakup inovatif, profesional, evaluasi diri, pengembangan ide baru, pelibatan bawahan, dan kreatif; 3) Individual Consideration, pemimpin yang menciptakan lingkungan dan iklim organisasi/lembaga yang mendukung, melalui indikator toleransi, adil, pemberdayaan karyawan, demokratis, partisipatif, memberikan penghargaan; 4) Inspiration Motivation, mendorong anggota untuk mencapai visi di masa depan dengan indikator memberikan motivasi, memberi inspirasi pada pengikut, percaya diri, meningkatkan optimisme, dan memberikan semangat pada kelompok.

Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu contoh demokrasi lokal dengan kepemimpinan lurah perempuan. Kalurahan adalah sebutan untuk sebuah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa padukuhan yang masing-masing memiliki batas wilayah dan kekayaan sendiri. Kalurahan dipimpin oleh lurah, sementara padukuhan dipimpin oleh dukuh. Perubahan nomenklatur desa menjadi Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada landasan legal Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Secara administratif, Kalurahan Sriharjo terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan status desa mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2018 dilaksanakan pemilihan lurah Sriharjo, dimana perilaku korupsi dan politik

uang bukanlah hal baru. Fenomena ini telah menjadi patologi sosial yang dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Para calon lurah sering memanfaatkan hak pilih yang tidak digunakan untuk mengamankan dukungan dengan memberi uang kepada masyarakat, terutama yang enggan untuk memilih (Fauzi & Fauzi, 2021). Praktik politik uang ini tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat. Kebijakan moneter dalam konteks politik mencakup pemberian uang kepada pemilih untuk memenangkan kandidat dalam pemilu. Dalam sistem demokrasi, kebangkitan politik uang secara perlahan akan merusak prinsip-prinsip demokrasi, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat dibeli (Nabila, 2020). Jika praktik ini terus berlanjut, rusaknya dunia politik Indonesia akan menjadi kenyataan.

Praktik demokrasi lokal di Sriharjo, sebelumnya dipimpin seorang laki-laki, namun karena kondisi kesehatan yang tidak baik memaksa untuk mundur dari jabatan tersebut. Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Plt. Lurah yang kala itu belum mampu memberikan perubahan di Sriharjo. Akan tetapi, inovasi nyata yang dapat dirasakan adalah sistem pelayanan terpadu di Balai Kalurahan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya penting untuk kepemimpinan tetapi juga untuk kemajuan organisasi. Fokus pada kekuasaan ini sangat penting karena membentuk dinamika siapa yang akan memimpin (Pick, 2024). Manfaat pembangunan Kalurahan Sriharjo belum dirasakan oleh masyarakat setempat, hingga pada akhirnya golongan pemuda mendorong Titik untuk maju pada pemilihan lurah. Titik merupakan aktivis *Non-Government Organization* (NGO) Institute Research and Empowerment (IRE), Mitra Wacana, dan Lentera berhasil mengambil hati pemuda yang mayoritas laki-laki untuk menjadi tim sukses pada kontestasi pemilihan lurah tahun 2018. Padahal, Titik tidak memiliki latar belakang keluarga yang menjabat di pemerintah desa, tidak menyurutkan semangat juang untuk membangun kalurahan. Motivasi untuk mencalonkan diri sebagai calon lurah ialah semangat “*mbangun ndeso*” atau membangun desa.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender di berbagai bidang perempuan, Titik masih menghadapi hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan belum merata di semua sektor masyarakat (Pick, 2024). Dalam konteks kebijakan moneter, ketegangan sosial-politik di Sriharjo tampak melalui praktik politik uang dan serangan fajar menjelang pemilihan lurah tahun 2018. Pemilihan ini diikuti oleh dua calon perempuan dan satu calon laki-laki. Berdasarkan observasi dan wawancara, calon laki-laki adalah seorang politisi senior. Namun, Titik membangun visi dan misi bersama masyarakat untuk memajukan Sriharjo. Semangat pembangunan kalurahan diwujudkan dalam visi dan misi lurah Sriharjo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2019-2025. Salah satu pendekatan sosial yang diterapkan Titik adalah upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Pada akhirnya, masyarakat Sriharjo tidak mempertimbangkan jenis kelamin, dan Titik memenangkan pemilihan

lurah dengan perolehan suara absolut sebesar 82 persen, terpilih sebagai lurah Sriharjo.

Dinamika politik lokal dan kepemimpinan di Kalurahan Sriharjo menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya terkait kepemimpinan perempuan dalam konteks politik uang dan pembangunan kalurahan. Studi tentang kepemimpinan perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian gender. Perempuan kerap dihadapkan pada dua arus yang bertentangan saat harus menentukan gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan di tempat kerja. Jamieson (1995) mengembangkan konsep *femininity/ competency bind*, dimana perilaku feminin seringkali diasosiasikan dengan ketidakmampuan, sedangkan perilaku maskulin dikaitkan dengan kompetensi. Jika model kepemimpinan maskulin dianggap sebagai model universal dan dominan (Fernandes & Cabral-Cardoso, 2003). Perempuan memahami bahwa untuk meningkatkan jenjang karier, mereka perlu menyesuaikan diri dengan model tersebut (Rigg & Sparrow, 1994). Dengan kata lain, beberapa strategi pengaruh yang efektif bagi laki-laki kerap diadopsi secara berulang oleh perempuan (Rizzo & Mendez, 1988). Strategi resiliensi perempuan di antara dua arus terkait gender dan gaya kepemimpinan ialah mengembangkan perilaku yang cukup feminin, tidak menyimpang dari ekspektasi peran gender, namun cukup maskulin untuk memperoleh kredibilitas sebagai profesional. Secara sederhana, perempuan harus menciptakan gaya kepemimpinannya sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Gardner (1995) bahwa kepemimpinan tidak pernah dijamin, melainkan harus selalu diperbarui.

Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam memimpin kalurahan serta tantangan yang muncul terkait praktik politik uang. Rozy *et al.* (2020) menunjukkan bahwa uang digunakan sebagai sarana efektif untuk mempromosikan calon kepala desa, yang memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan pada hari pemilu. Uang menjadi instrumen yang cepat dan efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Penelitian Amanu (2009) juga mengungkapkan bahwa kebijakan moneter digunakan untuk menarik dukungan, terutama dari perspektif ekonomi, dengan janji-janji politik yang disusun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Di beberapa desa, jabatan kepala desa memiliki nilai sosial yang tinggi, sehingga diperebutkan secara masif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kepemimpinan perempuan dan dinamika politik yang terjadi selama masa kepemimpinan Titik sebagai lurah Sriharjo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam kajian terkait kepemimpinan perempuan di level lokal dan interaksi antara politik uang serta pembangunan kalurahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik milik Robert K. Yin. Metode kualitatif dapat mengungkap secara mendalam dan spesifik tentang kepemimpinan perempuan dan konteks dinamika politik yang terjadi di Kalurahan Sriharjo, Bantul, D.I Yogyakarta. Studi kasus intrinsik

Robert K. Yin dipilih untuk menjelaskan peristiwa yang cenderung unik dan jarang terjadi di tempat lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dan *snowball sampling*. Informan yang dipilih adalah Perangkat Kalurahan Sriharjo, masyarakat Kalurahan Sriharjo, pedagang di kawasan wisata Srikemenut, dan akademisi. Analisis data menggunakan langkah-langkah penjadohan pola dalam pembuatan eksplanasi menurut Yin (2015: 146-150), yaitu 1) Pembuatan pernyataan teoritis/proposisi awal tentang kepemimpinan perempuan membawa perubahan signifikan melalui beragam bentuk program kebijakan yang inklusif; 2) Membandingkan temuan kasus-kasus kepemimpinan perempuan dan dinamika politik di desa lain; 3) Memperbaiki pernyataan atau proposisi yang sudah dibangun sejak awal dan disesuaikan dengan data empiris; 4) Membandingkan kasus kepemimpinan perempuan dan dinamika politik di tempat lain dalam rangka perbaikan; 5) Memperbaiki kembali pernyataan/proposisi apabila tidak sesuai dengan data yang ditemukan; 6) Membandingkan proposisi awal dengan fakta-fakta dari berbagai kasus kepemimpinan perempuan dan dinamika politik yang terjadi; dan 7) Mengulangi proses penjadohan pola secara menerus hingga mendapatkan proposisi yang tepat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pembahasan

Kepemimpinan Perempuan dalam Demokratisasi Perdesaan

Kepemimpinan perempuan dalam proses demokratisasi perdesaan memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan gender. Di Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan lurah kerap kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti stereotip gender, biaya politik yang tinggi, dan keterbatasan akses terhadap modal sosial. Namun, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan desa.

Kepala desa perempuan berperan penting dalam pembangunan desa. Namun, pemimpin perempuan masih dihadapkan dengan berbagai persoalan di masyarakat termasuk stigma dan budaya patriarki yang mengakar kuat. *Core-substance* kepemimpinan diartikan pada pengaruh, kata 'Kepemimpinan Perempuan' dianggap sebagai wujud *apologetic* semata, dan tanpa fondasi kajian yang kuat. Perempuan dihadapkan pada sentimen negatif dari segala aspeknya, seperti historisitas penciptaannya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Secara kebudayaan, perempuan adalah sosok yang lebih banyak memiliki kelemahan dibandingkan kelebihan. Dari sisi dogmatisme keagamaan, perempuan ada di bawah kendali atau kuasa laki-laki (Pasya, 2014).

Kepemimpinan perempuan secara *elite capture*, menghadirkan berbagai peluang dan tantangan. Pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu desa menjadi subjek dari pembangunan. Lurah memiliki peluang besar untuk mengembangkan desa berdasarkan kearifan lokal. Namun, tantangan

yang dihadapi oleh lurah perempuan antara lain politik uang, bias gender, dan sistem patriarki yang masih kuat memerlukan strategi yang lebih terstruktur. Selain itu, lurah perempuan juga harus memiliki modal sosial yang kuat di lingkungan desa. Hal ini penting untuk mematahkan stigma bahwa kepemimpinan perempuan cenderung komunal, akomodatif, dan lemah lembut, yang sering dianggap kurang efektif dalam konteks kepemimpinan (Rumimpunu, 2018).

Praktik kepemimpinan perempuan tercermin pada salah satu desa mandiri budaya di D.I. Yogyakarta. Titik merupakan seorang perempuan yang terpilih menjadi lurah di Kalurahan Sriharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta, yang terpilih pada tahun 2018 dan masih menjabat hingga kini. Menariknya, Titik adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai lurah di Sriharjo. Latar belakang profesional sebagai aktivis sosial, mendorong Titik untuk mendalami kajian sosial-politik sebagai modal penting untuk terjun ke dunia politik di tingkat perdesaan. Secara genealogis, Titik tidak memiliki keluarga yang tergolong elit di kalurahannya, namun keinginannya untuk mengabdikan diri di kalurahan menjadi motivasi utama dalam mencalonkan diri sebagai lurah. Selaras dengan teori *transformational leadership*, menekankan pada gaya kepemimpinan perempuan yang dibangun atas kerjasama, kolaborasi, *lower control*, penyelesaian masalah yang didasarkan atas intuisi dan rasionalitas (Bass, 1994). Semangat juang dan ketekunan yang dimilikinya turut berperan dalam keberhasilan Titik memimpin pembangunan di Sriharjo. Kepemimpinan perempuan bukan sekadar subjek prasangka kelompok feminis, tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi yang setara atau bahkan lebih dalam kepemimpinan (Mukhlisah, 2014).

Masyarakat Kalurahan Sriharjo tergolong dalam kategori solidaritas mekanik yang khas dengan karakteristik masyarakat perdesaan. Solidaritas mekanik ini tercermin dari kurangnya pembagian tugas yang jelas dan tingginya budaya gotong royong. Dalam perspektif sosial-politik, masyarakat Sriharjo memiliki pandangan yang beragam terhadap kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan Titik dikategorikan sebagai *idealized influence*, dimana ia menjadi teladan dengan semangat juang yang tinggi dan dedikasi bagi masyarakat Sriharjo. Selain itu, kepemimpinan perempuan juga terbukti mampu membawa perspektif baru dalam pengelolaan pembangunan kalurahan yang lebih partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Senada dengan teori kepemimpinan transformasional Bass & Avolio (1994), pemimpin yang kharismatik, memiliki visi dan lingkungan yang suportif khususnya untuk anggota agar berprestasi dalam mencapai harapan.

Dukungan politik terhadap perempuan di Kalurahan Sriharjo diberikan secara penuh oleh kelompok muda yang mayoritas terdiri atas laki-laki yang mendorong Titik untuk berpartisipasi dalam pemilihan lurah. Kepemimpinan Titik berhasil menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif dan mendukung dengan menekankan sikap toleransi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Hal ini relevan dengan konsep *individual consideration* dalam teori kepemimpinan transformasional Bass & Avolio (1990). Potensi kepemimpinan perempuan setara

dengan laki-laki. Hal ini menekankan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kualitas serupa untuk memimpin sebuah organisasi/lembaga. Pemimpin perempuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lingkungan dan suasana organisasi yang terstruktur dengan baik serta efektif. Kepemimpinan bukan hanya domain laki-laki, melainkan perempuan juga dapat unggul dan memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan lembaga (Nasution et al., 2024). Kepemimpinan perempuan dengan cakap membangun hubungan, memberikan dukungan dan motivasi untuk orang lain agar berhasil, membangun pola komunikasi yang baik, dan menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya dengan rasa aman.

Berdasarkan hasil wawancara, Titik menyatakan bahwa terdapat kesatuan visi dan komitmen bersama dengan masyarakat untuk membangun kalurahan. Kepemimpinan perempuan memerlukan modal sosial yang kuat, dimana lurah tidak hanya mengandalkan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga kemampuan mengorganisir seluruh komponen kalurahan untuk bersinergi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan desa mandiri yang tidak bergantung pada desa lain atau pemerintah (Surida, 2022). Proses demokrasi lokal di Sriharjo menunjukkan bahwa identitas gender tidak memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Ini membuktikan bahwa perempuan dapat dipercaya untuk memimpin desa, menjadi potret praktik demokrasi yang inklusif di Kalurahan Sriharjo. Dalam konteks ini, Nurcahyo (2016) menjelaskan bahwa representasi politik perempuan sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang ramah gender. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi momentum bagi kebangkitan demokrasi di tingkat lokal.

Isu gender di tingkat perdesaan umumnya terkait erat dengan budaya patriarki yang kuat. Politik sering dianggap sebagai ranah kekuasaan laki-laki, sejalan dengan peran-peran yang secara tradisional dilekatkan pada perempuan (Hikmawan, 2017). Namun, selama lima tahun kepemimpinan Titik terjadi perubahan signifikan di Kalurahan Sriharjo. Kepemimpinan Titik membawa dampak positif yang ditandai dengan pengakuan Sriharjo sebagai Desa Mandiri Budaya, berkat berbagai pencapaian indikator pembangunan. Stereotip patriarki yang menganggap perempuan lemah berhasil dipatahkan melalui program-program nyata yang diimplementasikan Titik. Kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan visi seseorang dalam memajukan wilayah yang dipimpinya. Kiprah politik Titik, dimulai dari mimpi untuk membangun Kalurahan Sriharjo. Mimpi atau cita-cita tersebut kemudian dituangkan dalam visi Titik yang ingin diraih selama enam tahun periode pembangunan jangka menengah desa. Visi ini kemudian diarahkan untuk program-program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Sriharjo. Visi Sriharjo mulai periode 2019-2025 yaitu menuju Sriharjo yang mandiri, berdaulat, demokratis, religius, dan sejahtera. Visi Kalurahan Sriharjo tidak sekadar visi lurah Sriharjo terpilih semata, namun pada hakikatnya merupakan visi dari seluruh masyarakat Kalurahan Sriharjo. Selaras pada teori Bass dan Avolio (1990) dalam Wirawan (2009), kepemimpinan perempuan yang *inspiration motivation*, berupaya mendorong anggota untuk mencapai visi di masa depan dengan indikator

memberikan motivasi, memberi inspirasi pada pengikut, percaya diri, meningkatkan optimisme, dan memberikan semangat serta optimisme pada masyarakat Sriharjo.

Profil diri Titik sebagai pemimpin perempuan menempatkan dirinya sebagai seorang ‘ibu’ dan masyarakat sebagai ‘anak-anaknya’. Kepemimpinan perempuan memiliki kecenderungan menggunakan perasaan dibandingkan rasional. Titik menjadi pemimpin yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sriharjo. Kilas balik sebelumnya, birokrasi di pemerintahan desa sebelum Titik menjabat sangat jauh dari kata baik, bersikap otoriter dan cenderung berorientasi negatif. Hal inilah yang membuat masyarakat Sriharjo memiliki kebanggaan terhadap kepemimpinan Titik. Pasalnya, masyarakat mengakui bahwa kinerja pemerintahan desa di bawah naungan Titik mengalami kemajuan yang begitu pesat.

Meskipun dalam perjalanannya sering terjadi serangan dari pihak kontra yakni lawan politik Titik, kepemimpinannya tetap mendapat dukungan kuat dari masyarakat Sriharjo yang memiliki karakteristik komunal. Mariana *et al.* (2017) menyebutkan bahwa dalam masyarakat perdesaan, di mana akses kolektif atas sumber daya alam menjadi isu utama, demokrasi harus menekankan partisipasi kolektif warga. Kepemimpinan inovatif Titik berhasil menghadirkan terobosan yang didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat. Melalui gotong royong dan swadaya, masyarakat Sriharjo bersama-sama membangun sarana dan prasarana di setiap rukun tetangga. Teori kepemimpinan demokratis dan partisipatif mendorong perempuan untuk menciptakan rasa menghargai bawahan sehingga meningkatkan eksistensi mereka.

Kepemimpinan yang kuat, responsif, dan transparan menjadi elemen penting dalam pembentukan kepentingan publik serta memperluas ruang publik informal di desa (Mariana *et al.*, 2017). Titik memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat kepada warga Sriharjo, yang menciptakan inklusivitas bagi aspirasi publik. Konsep demokrasi komunitarian sebagai pilar *self-governing community* menekankan pentingnya partisipasi warga dalam urusan publik, pemerintahan, dan pembangunan pada level lokal. Trautmann (2007) menyebut bahwa seorang pemimpin harus mampu merespons perubahan yang terjadi secara adaptif, transformatif terhadap struktur, fungsi, pendanaan, dan metode yang dapat mengantarkan organisasi dalam meraih misinya. Dengan demikian, kepemimpinan di kalurahan dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi pada level lokal.

Dinamika Sosial Politik di Kalurahan Sriharjo

Kekuasaan sangat penting untuk kepemimpinan dan kemajuan lembaga meskipun pada level lokal. Ini menunjukkan bahwa bagaimana dinamika kekuasaan beroperasi secara berbeda untuk laki-laki dan perempuan untuk mengatasi ketidakadilan dalam peran kepemimpinan (Pick, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah Sriharjo pada tahun 2018-2024 telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan serta kelembagaan sosial dan politik. Budaya patriarki tidak memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan inklusif yang diini-

siasi oleh lurah Sriharjo. Fokus kepemimpinan tidak hanya terletak pada pengelolaan kekuasaan, tetapi juga pada upaya pembangunan berkelanjutan. Proses untuk membawa Sriharjo menuju kemajuan membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk supra desa. Implikasinya, kepemimpinan lurah Sriharjo berpotensi untuk dipengaruhi melalui intervensi birokrasi dari tingkat supra desa. Namun, kenyataannya Lurah Titik tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ketika Lurah Titik awal memimpin Kalurahan Sriharjo tahun 2018 berstatus Desa Maju dengan angka 0,7814. Indeks Desa Membangun terdiri dari komposit Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. Sehingga dalam proses penguatan aspek dan peningkatan nilai, membutuhkan waktu dan kinerja yang intensif. Dari perjuangan tersebut, tahun 2021 Kalurahan Sriharjo meraih status Desa Mandiri dengan angka 0.8175. Kemudian, terus berlanjut meraih status Desa Mandiri hingga tahun 2024.

Jika melihat perspektif dari Titik Istiyawatun Khasanah, menyatakan dalam sebuah wawancara:

“Ini subjektif dari saya, alhamdulillah ada progres yang bagus. Pandangan saya subjektif, saya pelakunya. Jadi dari sisi tata penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sekarang lebih tertata. Kemudian secara administrasi juga lebih tertata, manajemen penyelenggaraan kegiatan, dan lain sebagainya. Akuntabilitas, transparansi, kita bangun. Dalam hal ini partisipasi masyarakat semakin naik, dalam pembangunan. Bikin apa bikin apa itu luar biasa.”

Kemudian argumen tersebut didukung oleh beberapa masyarakat setempat. Dalam wawancara bersama Winarti, masyarakat Kalurahan Sriharjo, menyatakan dalam sebuah wawancara:

“Lurah sebelum bu Titik sama sekarang, ya sekarang kan lebih bagus. Bagus gimana, lebih maju, lebih makmur, dan masyarakat lebih sejahtera.”

Masyarakat Kalurahan Sriharjo mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran. Awalnya Kalurahan Sriharjo dari aspek tata kelola pemerintahannya buruk, cenderung korup, dan tidak terfasilitasi dengan baik. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Lurah didukung banyak orang membangun yang bersih dari politik uang. Pemetaan kepemimpinan dan dinamika politik Kalurahan Sriharjo, sebagai berikut.

Tabel 1. Pemetaan Kepemimpinan dan Dinamika Politik Kalurahan Sriharjo

Kriteria	Deskripsi
Kepemimpinan Lu- rah Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun relasi interpersonal dan antar personal; 2) Mengedepankan prinsip akuntabel; 3) Memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan sepenuh hati; dan 4) Profiling diri sebagai sosok ibu dari masyarakat.
Gerakan dan Inovasi	<p>Secara historis, Lurah Titik memiliki rekam jejak sebagai aktivis gerakan sosial. Titik merupakan sosok yang aktif dalam organisasi non-pemerintah (NGO) dan memiliki pengalaman proaktif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat daerah. Pengalaman ini menjadi modal berharga yang memperkuat kapasitas kepemimpinan Titik di Kalurahan Sriharjo. Dari segi inovasi, tata kelola pemerintahan mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek administrasi yang lebih sistematis serta manajemen penyelenggaraan kegiatan yang semakin terstruktur. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan institusi kalurahan turut memperkuat keterlibatan masyarakat, yang berimplikasi pada meningkatnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan di kalurahan.</p>
Pengelolaan Sumber Daya	<p>Pengelolaan sumber daya di tingkat kalurahan, kerap terjadi <i>elite capture</i>. Praktik ini disertai tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Proses rekrutmen untuk menjadi lurah sangat mahal sehingga merusak tatanan demokrasi di tingkat kalurahan. Aktivitas perjudian yang masif turut memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, serta mengikis integritas proses politik di masyarakat.</p>
Konflik Kepentingan	<p>Jika konflik kepentingan dapat diminimalisasi, akan muncul pemimpin yang lebih berkualitas. Saat ini mulai bermunculan pemimpin yang berkompeten, tanpa terikat pada pola pewarisan kekuasaan, seperti trah mantan lurah atau tokoh-tokoh senior kalurahan.</p>

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.

Dari pemetaan dinamika politik lurah Sriharjo di atas, terdapat 4 (empat) kriteria yang dapat di analisis lebih mendalam, sebagai berikut.

Kepemimpinan Lurah Perempuan

Kini terdapat banyak tren positif dari kepemimpinan perempuan di ranah pemerintahan. Misalnya di Kabupaten Bantul dalam pemilihan lurah yang terpilih beberapa kandidat perempuan. Perjuangan feminisme, mendorong perempuan tidak lagi fokus pada hal domestik saja, tapi sudah aktif ke ranah publik. Perempuan yang aktif di level kalurahan mulai banyak dan terus berkembang. Namun tidak bisa nafikan bahwa pertarungan level kalurahan masih bersifat kekerabatan. Beberapa kalurahan yang dipimpin perempuan, walau tidak menonjol menjadi tanda bahwa perempuan dapat menjadi *public figure* (Habib, 2024).

Lurah Titik, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), memiliki pengalaman luas sebagai aktivis di NGO dan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Saat beraktivitas di NGO, Titik sudah terlibat dalam kegiatan kalurahan untuk menggalang dukungan. Kalurahan Sriharjo sebagai salah satu kalurahan miskin, menghadapi tantangan dalam akses terhadap politik dan kekuasaan. Titik berhasil menjadi penghubung penting dalam membuka akses tersebut, sehingga terjadi perubahan signifikan di kalurahan. Sebagai lurah, perannya melampaui pengelolaan internal kalurahan, ia mampu menghubungkan kalurahan dengan berbagai kelompok eksternal seperti pengusaha, akademisi, dan pihak lainnya sehingga menarik dukungan dari luar. Lurah dengan modal dan akses politik yang kuat, seperti Titik, berperan penting dalam melanggengkan proses kepemimpinan dan pembangunan kalurahan (Pande, 2024).

Gerakan dan Inovasi

Berbicara gerakan dan inovasi kebijakan di Kalurahan Sriharjo yang berfokus pada aspek strategis, seperti peningkatan administrasi dan manajemen penyelenggaraan kegiatan, telah memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Titik, 2024). Inovasi kalurahan ini berkembang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri, dengan prinsip rekognisi dan legalitas yang kuat. Pelimpahan kewenangan dari tingkat supra-desa, terutama melalui bantuan dana desa, mempercepat perkembangan desa, meskipun isu korupsi tetap menjadi perhatian utama dalam pemerintahan lokal. Program Inovasi Desa (PID) mendorong setiap desa untuk berinovasi demi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan Kalurahan Sriharjo ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Kepemimpinan lurah yang visioner; 2) Kapasitas politik yang kuat; 3) Kapasitas sosial yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan 4) Pemberdayaan dan penguatan ekonomi (Habib, 2024).

Sumber Daya

Distribusi dana dari pemerintah pusat ke Kalurahan Sriharjo telah berjalan dengan baik sebagai wujud implementasi desentralisasi di tingkat kalurahan. Pada era sebelumnya, perputaran uang lebih terkonsentrasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Namun, sejak adanya alokasi dana kalurahan yang signifikan, kalurahan menjadi semakin berkembang. Meskipun dana tersebut telah didistribusikan dengan baik, masih dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Pemerintah Kalurahan Sriharjo kerap kali mengalami kebingungan dalam menentukan alokasi dana, sehingga peran lurah dan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan potensi yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur dan mengelola secara mandiri. Namun pemerintah pusat kerap menitipkan program-program yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalurahan. Oleh karena itu, Kalurahan Sriharjo dapat sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengelola pembangunan sesuai dengan esensi dan kebutuhan lokal (Habib, 2024).

Konflik Kepentingan

Potensi konflik kepentingan yang ada di Kalurahan Sriharjo, disebabkan karena dalam prosesnya seringkali *elite capture*. Proses rekrutmen menjadi seorang lurah biayanya cukup mahal, hal ini merusak belum lagi permainan perjudian di level lokal. Jika hal tersebut diminimalisasi, pasti akan tumbuh pemimpin yang bagus. Sekarang bermunculan pemimpin yang bagus, tidak lagi dengan skema trah mantan lurah atau penguasa-penguasa lokal. Ongkos sosial menjadi perangkat kalurahan tinggi sekali, terdapat lurah yang sukses. Relasi sosial menjadi penting, karena di kalurahan sangat hidup bermasyarakat. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pemimpin yang baik adalah yang memberikan uang atau bantuan materi, sehingga cenderung memiliki banyak pengikut (Habib, 2024).

Senada dengan konsep *followership* mencakup bukan hanya iming-iming uang, tetapi juga *iming-iming* kebijakan. Potret fenomena tersebut ada di salah satu desa termiskin, tepatnya di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan biaya politik untuk pemilihan lurah mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Proses ini dimulai dua tahun sebelum pemilihan dengan memberikan bantuan kepada warga, mengadakan jamuan makan, serta membagikan rokok dan barang pokok. Uang saja tidak cukup, tindakan tersebut harus berdampak pada perolehan suara. Rekam jejak calon penting karena relasi dan modal sosial dapat dimanfaatkan. Perbedaan dalam politik uang antara desa dan kota terletak pada durasi ingatan pemilih. Di kota, ingatan cenderung pendek, sehingga politik uang sering dilakukan menjelang pemilihan. Sebaliknya, ingatan masyarakat desa lebih panjang, sehingga pemilih lebih memperhatikan rekam jejak yang lebih lama (Habib, 2024).

Budaya patriarki dan agama seringkali membentuk stigma gender yang diang-gap setara di mata masyarakat. Titik berhasil menghadapi tantangan ini dengan menjalin kedekatan pada kelompok agama maupun kelompok sosial lainnya. Seorang lurah tidak hanya berfokus pada pengorganisasian internal, tetapi juga

harus menghubungkan potensi yang ada di dalam kalurahan dengan pihak eksternal. Seringkali, lurah yang terlalu fokus pada pengorganisasian internal gagal memanfaatkan potensi eksternal. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pengusaha lokal dan elit senior, serta mendekati kelompok muda, menjadi kunci keberhasilan seorang lurah. Lurah yang efektif biasanya menyediakan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi kalurahan mereka (Pande, 2024).

Kesimpulan

Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu praktik demokrasi lokal dengan kepemimpinan lurah perempuan. Titik sebagai lurah yang terpilih mampu membawa perubahan signifikan pada pembangunan Kalurahan Sriharjo. Tipe kepemimpinan Titik ialah kepemimpinan transformasional dengan mengutamakan inovasi dan partisipasi masyarakat kalurahan. Secara historis, saat pemilihan lurah tahun 2018 terdapat politik uang dan serangan fajar terjadi sangat kuat di Kalurahan Sriharjo. Titik memulai kepemimpinannya dengan membangun visi dan misi bersama masyarakat kalurahan. Figur keibuan dan jiwa visioner Titik, mendorong para pemuda yang mayoritas laki-laki mendukungnya di pemilihan lurah. Budaya patriarki tidak memengaruhi kepemimpinan Titik sebagai lurah Sriharjo dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang inklusif. Prinsipnya, kepemimpinan lurah perempuan tidak hanya fokus dalam kekuasaan untuk mengelola pemerintahan, melainkan elaborasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dinamika politik lokal di bawah kepemimpinan perempuan, tidak menyurutkan kemajuan pembangunan di Kalurahan Sriharjo yang kini justru menjadi role model perdesaan lain khususnya Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, serta umumnya perdesaan se-Indonesia.

Kontribusi Penulis

Nefa Wahyuning Anggraini: *Writing-Original Draf, Conceptualization, Methodology*
 Andre Dwi Prasaja: *Writing-review & editing, Validation*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah murni hasil penelitian sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme. Semua referensi yang digunakan tercantum dalam daftar pustaka. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dimanapun dan tidak sedang diajukan untuk publikasi ke jurnal atau media lainnya.

Biografi

Nefa Wahyuning Anggraini adalah Lulusan Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan pembiayaan Beasiswa LPDP. Aktif

sebagai peneliti isu sosial dan politik, serta presenter pada Konferensi Nasional maupun Internasional. Pada tahun 2024, menjadi Presenter the International Conference on Interdisciplinary Business, Economy, Management, and Social Studies (8th IBEMS) di Tokyo Kinshicho Japan. Salah satu karya yang dipublikasikan adalah "Village Government Efforts in Realizing the Highest National Building Village Index (IDM) in Ngroto Village".

Andre Dwi Prasaja, pemuda asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Aktif sebagai peneliti, fasilitator, dan konsultan pemerintah di SmartID. Lulus Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Brawijaya Tahun 2021. Melanjutkan studi Magister Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan pembiayaan Beasiswa LPDP dan pernah menjadi finalis UN Datathon tahun 2023, kompetisi big data yang diadakan oleh PBB. Salah satu karya yang pernah dipublikasikan adalah "Strengthening Fishermen's Leadership of Puspita Bahari Community for Supporting Blue Economy in Demak Regency".

Referensi

- Agung, E. S. (2022). *Strategi Local Strongman Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019*. Universitas Lampung.
- Bass, B. M. & B. J. A. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. SAGE Publications.
- Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>.
- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). Analisis Konflik Pilkada Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1785>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.
- Fernandes, E., & Cabral-Cardoso, C. (2003). Gender asymmetries and the Manager Stereotype among Management Students. *Women in Management Review*, 18, 77–87. <https://doi.org/10.1108/09649420310462352>
- Firdausi, N. I. (2020). Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *NOTARIUS*, 13.
- Gardner, H. E. (1995). *Leading Minds: an Anatomy of Leadership*. Basic Books.
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Iskandar, H. A. (2020). *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Jamieson, K. H. (1995). *Beyond the Double Bind: Women and Leadership*. New York: Oxford University Press.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 317.
- Mariana, D., et. al. (2017). *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institute Research and Empowerment.
- Migdal, J. S. (2012). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. New York: Cambridge University Press.
- Mukhlisah. (2014). Persepsi Tentang Kepemimpinan Perempuan, Scientific And Religious Reviews. *Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 200–228.
- Muktamar, A. (2022). Women Leadership: Examine the Capacity of Women as Leaders. *Enrichment : Journal of Management*, 12(5), 4052–4061.
- Muhlis. (2021). *Local Bossism Dalam Demokrasi Lokal di Bangkalan : Dinamika Aliansi Bisnis Politik Dominan di Bangkalan Pasca Berakhirnya Kekuasaan Politik Fuad Amin Imron*. Universitas Airlangga.
- Nasution, S. W. R., Ayu A., D., & Aidha, Z. (2024). The Role of Women's Leadership in Developing Organizational Culture (Case Study at the Family Planning Counseling Center, Medan Tembung District). *AMK : Abdi Masyarakat UIKA*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.32832/amk.v3i1.2264>.
- Niño-Torres, A. (2019). *Female Leadership in Rural Areas: a Social Innovation Review*. 359(Icsbal), 20–24. <https://doi.org/10.2991/icsbal-19.2019.5>.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (The Relevance of Patriarchal Culture to Women's Political Participation and Representation in Parliament). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25.
- Nurwani. (2017). *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pane, M. D., Sukmadiningrat, R. F., & Rasyid, M. N. (2020). Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Terkait Pilkada Serentak 2019. *Sasi*, 26(28), 213–224.
- Pasya, G. K. (2014). *Peranan Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik*. Bandung: UPI.
- Pick, K. (2024). *Women, Leadership, and Power* (pp. 220–240). Elgar Online. <https://doi.org/10.4337/9781035306893.00025>
- Rahma, N., Ibrahim, & Ranto. (2023). Fenomena Local Bossism Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1284–1290.
- Ratnasari, D., & Adi, A. S. (2016). Hubungan Penerimaan Money Politic Dengan Tingkat Partisipasi Jatikalen Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 3(4), 1859–1869.
- Rigg, C., & Sparrow, J. (1994). Gender, Diversity and Working Styles. *Women in Management Review*, 9(1), 9–16. <https://doi.org/10.1108/09649429410050971>

- Rizzo, A.-M., & Mendez, C. (1988). Making Things Happen in Organizations: does Gender Make a Difference? *Public Personnel Management*, 17(1), 9–20. <https://doi.org/10.1177/009102608801700102>
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Rumimpunu, S. R., Rares, J.J., Tampi, G. B. (2018). Kepemimpinan Perempuan di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Suciu, M. C., Bocăneală, A.-M., & Dumitrescu, D. O. (2023). The Women Leadership. A Human-Centered Approach. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 17(1), 1681–1690. <https://doi.org/10.2478/picbe-2023-0150>
- Surida, A. (2022). Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.115>
- Thoha, M. (2010). *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Gava Media.
- Tjahjoko, G. T. (2020). Fighting Money Politics and Shamanic Practices. *Jurnal Politik*, 5(2), 169. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.241>
- Trautmann, K., Maher, J. K., Motley, D.G. (2007). Learning Strategies as Predictors of Transformational Leadership: the case of Nonprofit Managers. *Leadership & Organization Development Journal*, 28(3), 269–287. <https://doi.org/10.1108/01437730710739675>
- Watkins, M. B., Smith, A. N. (2012). Importance of Women's Political Skill in Male-dominated Organizations. *Journal of Managerial Psychology*, 29(2), 206–222.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, Robert. (2015). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.